

BAB V

KESIMPULAN

Perjalanan dalam pencarian solusi tercepat dan terbaik bagi pemanasan global bukanlah hal yang mudah. Memerlukan penanganan serius tidak hanya oleh satu kelompok kepentingan melainkan oleh seluruh penghuni bumi yang juga telah merasakan akibat dari cuaca yang tidak menentu saat ini. Protokol Kyoto sampai Copenhagen Accord adalah bukti bahwa dunia peduli akan masalah ini.

Pemanasan global atau biasa disebut dengan global warming bukan lagi sekedar masalah lingkungan biasa melainkan telah merambah ranah politik. Pemanasan global telah menjadi isu hubungan internasional karena masalah ini telah melintasi batas yuridiksi dan mempengaruhi pengambilan keputusan suatu negara.

Untuk meminimalisir bahkan menghentikan dampak dari global warming yang lebih besar maka para pihak (negara anggota dan *observers* yang terlibat dalam konferensi) menawarkan salah satu solusi terbaiknya yaitu dengan mengembalikan fungsi hutan atau melestarikan hutan. Hutan yang awalnya dianggap sebagai penyebab terbesar bertambahnya emisi global, saat ini dilihat dari sisi yang berbeda. Hutan saat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam hal pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain sebagai penyerap karbon, hutan juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Indonesia sebagai pemilik hutan terbesar ketiga di dunia mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam hal penurunan emisi global. Sebagai “*paru-paru dunia*”, Indonesia merasa perlu untuk ikut berperan aktif dalam setiap pertemuan baik nasional maupun internasional untuk menjadi bagian dari solusi terbaik penghentian pemanasan global. Namun sayangnya, banyaknya kebakaran hutan akibat *illegal logging* dan pengalihan fungsi hutan telah memperparah kenaikan emisi global yang menjadi penyebab utama global warming.

Kebakaran hutan di Indonesia menempatkan Indonesia sebagai negara pengemisi ketiga terbesar di dunia. Hutan Indonesia saat ini mengalami penurunan fungsi yang sangat drastis. Banyaknya tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab mengakibatkan kegundulan hutan yang mengakibatkan hutan Indonesia rusak. Dan parahnya, hutan yang telah rusak tidak akan pernah kembali seperti asalnya. Saat ini laju kerusakan hutan Indonesia berkurang sekitar 1,1 juta hektar per tahun (data Walhi, Maret 2010), sedangkan reboisasi hanya mampu sekitar 500 ribu hektar setiap tahunnya. Ini berarti, kita membutuhkan waktu tiga tahun enam bulan hanya untuk memulihkan hutan yang dirusak satu tahunnya, yang mana perusakan hutan itu tidak terjadi satu atau dua tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Selain itu, masalah finansial menjadi faktor terhambatnya pelestarian hutan di Indonesia. Biaya yang tidak sedikit dibutuhkan untuk melestarikan hutan sehingga Indonesia dengan beberapa negara lain menawarkan proposal penawaran

dalam rangka penghentian dampak yang lebih besar dari pemanasan global melalui program REDD.

REDD-plus adalah salah satu solusi pengurangan emisi global dalam bidang kehutanan. *Reducing Emissions from Deforestation and Degradation* (REDD) adalah program yang diajukan oleh Papua Nugini dan Costa Rica yang didukung oleh delapan pihak yang tergabung dalam *Coalition for Rainforest Nations* (CfRN) mengenai insentif untuk pecegahan deforestasi. Penambahan "*plus*" menyatakan konservasi yang menunjukkan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan.

REDD-plus yang telah direncanakan sejak COP 11 akhirnya disepakati dalam *Conference of the Parties* kelima belas di Copenhagen 2009. Selain menyetujui program REDD-plus, konferensi tersebut juga menyepakati untuk secepatnya mengadakan tindakan adaptasi dan mitigasi serta transfer teknologi yang juga akan sangat mendukung program REDD-plus. Saat ini negara maju dan industri sedang berlomba – lomba untuk mencari negara yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam rangka pelestarian hutan dan Indonesia mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendapatkan keuntungan dari program REDD-plus tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang banyak diharapkan oleh negara-negara di dunia mempunyai kepentingan dalam hal pelestarian hutan. Selain bantuan finansial dan transfer teknologi, Indonesia juga berpeluang besar untuk dapat meningkatkan posisi *bargaining* dalam kancan internasional, khususnya dalam hal perdagangan karbon yang nantinya dapat merambah pada bidang-bidang lain. Sehingga selain ikut aktif

berpartisipasi dalam menangani masalah pemanasan global yang juga telah dirasakan dampaknya oleh masyarakat, Indonesia juga berpeluang untuk mendapatkan keuntungan lainnya, seperti: dukungan finansial, transfer teknologi, dan yang terpenting peningkatan posisi bargaining Indonesia di kancan internasional.

Namun setiap keputusan selalu ada *pro dan kontra*, begitu juga dengan keputusan Indonesia untuk berperan aktif dalam perdagangan karbon khususnya program REDD-plus. Beberapa kelompok kepentingan merasa bahwa ini merupakan salah satu bentuk penjajahan dalam bidang industri. Dengan membiarkan negara maju dan industri tetap melangsungkan bisnisnya dan membuat terobosan-terobosan baru dalam bidang industri, sedangkan negara berkembang yang dalam hal ini Indonesia diharuskan untuk menjaga emisi agar tetap seimbang melalui pelestarian hutan dan dikhawatirkan nantinya ini akan berakibat pada ketergantungan negara berkembang kepada negara maju dalam bidang industri. Beberapa pihak juga bersikeras bahwa ini adalah tugas negara maju dan negara industri untuk memperbaiki bumi karena semua yang terjadi saat ini akibat pemanasan global adalah akibat dari negara maju dan negara industri.

Mungkin benar apabila sebagian besar emisi global disumbang oleh negara maju dan industri, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kita juga menyumbang emisi global baik secara sadar maupun tidak. Polusi udara dari kendaraan-kendaraan tidak ramah lingkungan dan kebakaran hutan adalah salah satu penyebab terbesar bertambahnya emisi global yang berasal dari

negara berkembang yang sebagian besar mempunyai luasan hutan yang cukup luas. Dalam program REDD-plus, Indonesia dituntut untuk melestarikan hutan dengan target tertentu. Pelestarian hutan juga tidak sekedar melestarikan biasa namun ada tahap-tahap khusus untuk memaksimalkan fungsi hutan. Keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia melalui program REDD-plus selain kompensasi dana adalah transfer teknologi dari negara maju dan industri kepada negara berkembang untuk mempercepat penghentian dampak global warming. Dengan berjalannya program ini, diharapkan dapat semakin menyadarkan masyarakat umum mengenai bahaya global warming dan sesegera mungkin menghentikan *illegal logging*.

Penjelasan di atas membenarkan hipotesa bahwa peran aktif Indonesia dalam CoP 15, Copenhagen selain karena kesadaran akan bahaya yang sedang mengancam negara saat ini tetapi juga karena ada kepentingan Indonesia untuk mencapai persetujuan mengenai kelanjutan program REDD yang diharapkan dapat dicapai pada konferensi Copenhagen ini. Dan dengan masuknya program tersebut dalam kesepakatan Copenhagen maka kompensasi dana dari negara maju kepada negara berkembang guna pelestarian hutan khususnya di Indonesia akan tercalisasi.